

---

**TINGKAT MILITERISASI NEGARA-NEGARA ASEAN  
BERDASARKAN NATURAL BALANCE OF POWER  
MILITARIZATION LEVEL OF ASEAN COUNTRIES  
BASED ON NATURAL BALANCE OF POWER**

**Posma Sariguna Johnson Kennedy<sup>1</sup>**

*Universitas Kristen Indonesia; Jl. Mayjen Sutoyo No.2*

*Jakarta, (021)8092425/80880437*

*Jurusan Manajemen, FE UKI, Jakarta*

*email : posmahutasoit@gmail.com, webmas@uki.ac.id*

**ABSTRAK**

*Sejak tahun 2000 terjadi tren penurunan pengeluaran pertahanan di seluruh dunia, namun di Asia Tenggara, secara keseluruhan pengeluaran pertahanan justru mengalami kecenderungan peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat militerisme suatu negara dengan pendekatan natural balance of power, dimana besaran-besaran ekonomi dimasukkan di dalamnya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menganalisa indeks tingkat militerisasi melalui GMI (Global Military Index), dengan indikator utama adalah rasio jumlah tentara, rasio anggaran militer, populasi dan pendapatan nasional (GDP). Dari hasil penelitian terlihat bahwa secara absolut tingkat militerisasi negara-negara ASEAN termasuk tinggi, kecuali Indonesia yang sangat rendah, tetapi memiliki kecenderungan menurun. Hal ini harus diwaspadai dan diperhatikan, karena dapat menjadi potensi ancaman akibat kekuatan yang tidak seimbang antar negara. Dengan kesadaran tersebut, negara-negara ASEAN dapat saling bekerja sama dan saling mengingatkan sebagai kawan, serta program-program pertahanan dapat ditujukan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional dan perdamaian di kawasan.*

**Kata kunci :** *tingkat militerisasi, natural balance of power, ekonomi pertahanan*

**ABSTRACT**

*Since 2000 there was a downward trend in defense spending throughout the world, but in Southeast Asia, overall defense spending experienced an increasing trend. The purpose of this study is to look at the level of militarism of a country with a natural balance of power approach, in which the indicators of the economy included in the calculation. The method used is descriptive method by analyzing the index level of militarization by GMI (Global Military Index) with the main indicator is the ratio of the number of soldiers, the ratio of the military budget, population and national income (GDP). The research shows that the absolute level of*

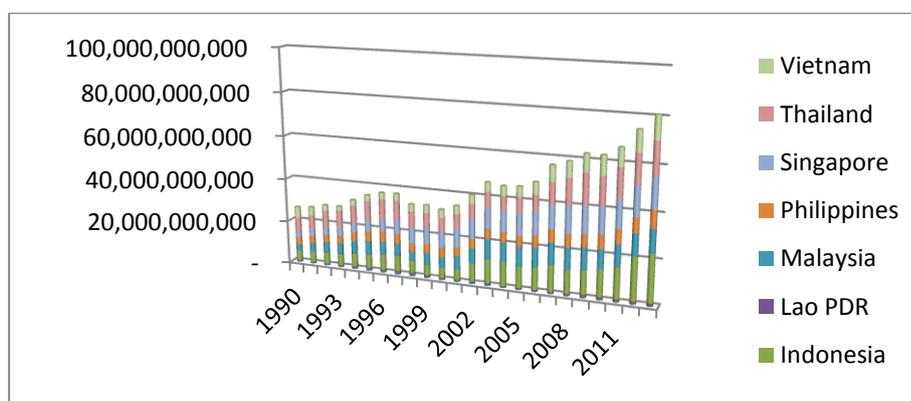
*militarization of the ASEAN countries are high (except for Indonesia which is very low) but it has a tendency to decrease. This should be awared, because it can be a potential threat due to an unbalanced force between countries. With this awareness, ASEAN countries can cooperate with each other and remind each other as friends, as well as defense programs can be designed to maintain the growth of the national economy and peace in the region.*

**Keywords :** *militarization level, natural balance of power, defense economics*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Ancaman Eksternal

Periode tahun 1986-2000 terjadi tren penurunan pengeluaran pertahanan di seluruh dunia. Akan tetapi untuk kondisi di Asia, pengeluaran pertahanan justru mengalami tren meningkat. Sebelum Asia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998, pengeluaran militer dari negara-negara Asia meningkat secara cepat. Bahkan setelah krisis, walaupun menurun sedikit, tetap kembali meningkat sejak tahun 2000. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik anggaran militer khusus untuk negara-negara ASEAN dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Anggaran Militer Negara-Negara ASEAN (PPP, current \$)

Sumber : Hasil olah data dari *World Development Indicator*

Peningkatan pengeluaran militer ini tentunya dapat meningkatkan eskalasi keamanan regional. Walaupun Asia mampu meningkatkan kemakmuran ekonominya, negara-negara masih didera oleh berbagai isu keamanan, baik dalam bentuk tradisional maupun non-tradisional. Isu-isu penting banyak bermunculan, seperti kesenjangan sosial ekonomi, ancaman ketersediaan energi, komunikasi garis

laut, kemungkinan penurunan pariwisata akibat ancaman terror, dan lain-lain. Asia pun rawan akan instabilitas, seperti adanya konflik perang antar warga, ketidakamanan, konflik etnis, perang-perang yang muncul secara temporer, dan terorisme telah merusak hubungan antara negara dengan lainnya

Bagi pemerintah di negara-negara Asia, kekuatan persenjataan memainkan fungsi utama untuk menjaga keamanan internal. Dalam banyak kasus, negara-negara telah mengalami transisi menuju pendewasaan demokrasi, hal ini dapat menyebabkan perselisihan antar politisi, antar warga, antar etnik, antar agama, ketidakadilan sosial yang dapat menyebabkan *instability* dan *insecurity*. Dengan adanya perubahan politik dan lingkungan ekonomi, perlu adanya misi militer yang baru, tidak hanya dalam bidang anggaran, tetapi juga mengantisipasi ancaman dari luar termasuk ancaman keamanan lintas negara, seperti lalu lintas narkoba, migrasi ilegal, penurunan kualitas lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan operasi perdamaian [1].

Akibat adanya ketidakstabilan politik, keamanan internal, dan ancaman dari luar (*external threats*) kepada negara, telah menjadikan alasan secara umum bagi negara-negara di Asia untuk menyediakan sumber-sumber daya bagi pengeluaran militer. Pada kenyataannya, meningkatnya pengeluaran militer bergantung pada faktor-faktor yang bervariasi seperti eskalasi dari konflik, peperangan, revolusi, dan ideologi. Secara umum dapat dirumuskan ancaman-ancaman yang menjadi otoritas, adalah: ancaman yang bersifat militer, ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal, ancaman yang menggunakan strategi militer konvensional, dan ancaman yang bersifat langsung mengancam integritas teritorial.

Ancaman eksternal mengacu kepada aktor-aktor yang menimbulkan ancaman adalah negara. Dengan demikian kesiapan persenjataan yang modern dan mahal harus disiapkan. Hal ini berbeda dengan ancaman internal yang cenderung asimetris, dimana gangguan-gangguan keamanan, cenderung tidak melibatkan persenjataan berat dan modern. Karena berbicara mengenai pertahanan maka berkonotasi terhadap kemampuan negara menghadapi ancaman tradisionalnya atau ancaman eksternal, dimana negara harus melindungi warga negaranya terhadap ancaman-ancaman dari negara-negara lain terutama dari lingkungan strategisnya.

Sesuai dengan kondisi ASEAN, ancaman diperlakukan sebagai laten atau potensial dibanding sebagai ancaman aktif. Negara lebih menekankan pada kekuatan fundamental yang menyebabkan pandangan terhadap ancaman lebih implisit daripada eksplisit. Ancaman fundamental lebih dilihat dari keamanan nasional secara potensial yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pertahannya. Walaupun belum terdapat gesekan-gesekan yang signifikan di antara negara-negara Asean dan keadaan *security dilemma* (perlombaan senjata), namun hal ini tidak boleh membuat negara lengah untuk menganalisa potensi ancaman eksternal di wilayah/lingkungan strategisnya. Salah satu cara untuk melihat potensi ancaman antar negara adalah dengan melihat tingkat militerisasi antar negara. Sesuai gambaran di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat militerisasi negara-negara ASEAN berdasarkan pendekatan *natural balance of power*.

## 1.2 Natural Balance of Power

Keberadaan kekuatan dari setiap negara relatif dengan kekuatan negara-negara tetangganya sangat diperhatikan dalam perhitungan ancaman. Besaran ini mengasumsikan semakin besar kapabilitas relatif suatu negara (*nation's relative capability*), semakin besar pula pengaruh politik dan militernya terhadap lingkungan strategisnya. Distribusi kapabilitas ini asimetrik diantara negara-negara sehingga membentuk ancaman dan tekanan di antara mereka.

Chatterjee [2] menjelaskan, secara klasik keseimbangan distribusi kekuatan ini atau *balance of power* sangat dipengaruhi paling besar oleh kekuatan militer suatu negara baik jumlah tentara, jumlah persenjataan maupun teknologi yang tercermin pada anggaran militernya. Hopkins & Mansbach [3] menjelaskan bahwa konsep ini sebenarnya memiliki beberapa kelemahan. Pertama, pada kenyataannya penyesuaian kekuatan itu tidak berjalan otomatis, tetapi tergantung pada kemampuan para aktor atau negarawan untuk melihat dan manafsirkannya secara tepat. Kedua, dalam kasus-kasus spesifik sangat sulit mengetahui apakah perubahan-perubahan dalam sumber daya itu dipengaruhi para aktor atau tidak. Ketiga, model ini tidak memperhitungkan tujuan dan motivasi negara-negara

tersebut, karena tidak semua negara menggunakan pengaruhnya untuk terus melakukan peningkatan sumber daya dan kekuatan demi memperoleh pengaruh dalam politik internasional.

Pada perkembangan selanjutnya, seperti yang dinyatakan oleh Virmani [4], semenjak selesainya Perang Dunia II dunia berubah secara dramatis, sehingga konsep “*balance of power*” secara gradual berubah menjadi “*natural balance of power*” dimana besaran ekonomi menjadi dasarnya. *Balance of power* ini juga akan disebut “*stable balance*” jika menunjukkan *natural balance*. *Natural balance of power* ini merupakan cita-cita perdamaian bangsa di dunia yang hingga kini masih terus akan diusahakan perwujudannya. *Natural balance of power* didefinisikan sebagai sikap bertanggung jawab suatu negara dalam meningkatkan kekuatan potensial relatifnya secara proporsional dengan memperhatikan internasionalisasi dan hak-hak global. Sistem yang dibangun diharapkan mampu menciptakan kompetisi ekonomi yang damai antar negara. Di dalam negaranya sendiri tidak terjadi kompetisi antar dimensi, baik ekonomi dan militer.

Virmani [4] menjelaskan bahwa kondisi stabil dalam *naturalbalance of power* akan terwujud jika :

- a. Kekuatan militer relatif adalah proporsional dengan kekuatan ekonomi. Postur militer dibentuk dalam besaran yang rasional dan terlegitimasi.
- b. Pembangunan militer yang agresif dapat diidentifikasi dan secara serta merta diisolasi oleh sistem internasional/global sebelum ada korban-korban yang berjatuhan akibat agresifitas tersebut.
- c. Perubahan dalam kekuatan ekonomi relatif berhubungan langsung dengan kedudukan suatu negara dalam hubungan internasional. Yang terkuat adalah yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.
- d. Hubungan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi sangat intensif yang meningkatkan kekuatan kolektif sehingga meningkatkan biaya bagi suatu negara jika ingin melakukan agresifitas.

Perbedaan keseimbangan kekuatan antar negara dapat memberikan persepsi ancaman bagi yang lebih lemah. Lebovic & Ishaq [5] mendefinisikan situasi mengancam adalah terjadinya distribusi kekuatan yang asimetris antar negara yang

menciptakan suatu kondisi mengancam (*threat*) dan ketegangan (*tension*) atau eskalasi diantara mereka. Dengan demikian situasi mengancam ini dapat diekspresikan sebagai konsep kekuatan relatif. Namun bentuk asimetris kekuatan ini dilihat dari sudut pandang berbeda-beda tergantung motif apa yang melandasi kondisi ini. Dari persepsi ini maka suatu negara membuat kebijakan pengeluaran pertahanan mereka.

Komitmen yang jelas antar negara dapat memberikan ketidakmungkinan terjadinya perang jika distribusi kekuatannya tetap, maupun saat terjadi perubahan distribusi kekuatan. Namun informasi yang tidak simetris dapat memberikan kemungkinan terjadinya perang sekalipun tidak terjadi perubahan distribusi kekuatan. Perkembangan teknologi berpengaruh penting dalam pembentukan perilaku suatu negara berdasar pada perhitungan manfaat dan biaya. Jika biaya berperang sangat mahal maka akan memperendah risiko terjadinya, tetapi jika suatu negara merasa manfaatnya lebih besar maka risiko terjadinya perang akan lebih tinggi.

Setiap negara akan menghadapi situasi yang berbeda-beda di lingkungan internasional strategis mereka. Misalnya, keamanan di Asia Tenggara tentunya berbeda dengan Timur Tengah dan Eropa maupun Amerika Latin. Lebovic & Ishaq membagi dua kondisi bagaimana negara bertindak dalam menghadapi ancaman sesuai dengan keadaan lingkungan strategis mereka, yaitu :

- a. Pertama, suatu negara akan berusaha memiliki kapabilitas militer yang tinggi secara agresif tanpa melihat proporsi kekuatan antar negara. Dalam menghadapi ancaman, negara tersebut membuat dirinya sebagai yang terkuat di kawasannya.
- b. Kedua, ancaman diperlakukan sebagai laten dibanding sebagai ancaman aktif. Ancaman dipersepsikan sebagai tekanan. Ketika persepsi tekanan dan tegangan politik mengalami perubahan, akan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran militernya. Negara ini juga lebih menekankan pada kekuatan fundamental yang menyebabkan pandangan terhadap ancaman lebih implisit daripada eksplisit. Ancaman fundamental lebih dilihat dari keamanan nasional secara potensial yang berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian dan pembangunan pertahanannya.

Situasi yang dihadapi suatu negara akan tercermin dari kebijakan anggaran militer dalam membangun kekuatan pertahanannya. Tingkat ancaman dapat diproksi dari kapabilitas militer relatif yang berbeda-beda antar negara. Sesuai dengan konsep *natural balance of power* yang berkembang saat ini, dimana kompetisi yang dikehendaki adalah persaingan secara sehat di bidang ekonomi, maka asimetris dari perimbangan militerisasi suatu negara menjadikan potensi ancaman yang dihadapi negara lain.

## 2. METODE PENELITIAN

Tingkat ancaman dapat dilihat melalui tingkat militerisasi suatu negara memiliki konsep sangat abstrak, karena itu perlu sebuah indeks untuk memproksinya. Militerisasi merupakan kebijakan dari suatu negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan meningkatkan kekuatan nasional yang diarahkan melalui pembangunan kekuatan militer. Sampai saat ini masih sangat sulit menentukan tingkat ancaman secara kuantitatif. *Global Military Indeks* (GMI) dapat digunakan untuk melihat keadaan ini berdasarkan tingkat militerisasi suatu negara. GMI merupakan indeks yang menggambarkan kapasitas kekuatan persenjataan atau tingkat militerisasi<sup>1</sup> terhadap kecenderungan peningkatan atau penurunan persenjataan dalam suatu negara. Indeks ini diterbitkan oleh BICC (*Bonn International Centre for Conversion*). Indeks ini menunjukkan tingkat militerisasi 153 negara yang dikeluarkan secara tahunan sejak tahun 1990 oleh BICC dengan dukungan Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

GMI inilah yang digunakan sebagai kapabilitas militer dalam penelitian ini untuk menghitung ancaman eksternal dari negara-negara lain. GMI dibangun

---

melalui sejumlah indikator untuk melihat tingkat militerisasi negara. Indikator-indikator tersebut adalah :

- Perbandingan pengeluaran militer dengan produk domestik bruto (PDB) dan pengeluaran kesehatan (sebagai bagian dari PDB suatu negara);
- Perbandingan antara jumlah tentara/pasukan militer dan jumlah dokter sertaseluruh populasi;
- Perbandingan jumlah senjata berat yang tersedia dan jumlah seluruh populasi.

Pembangun GMI ini menggunakan data-data yang diambil dari *Stockholm Peace Research Institute (SIPRI)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *the World Health Organization (WHO)*, *International Institute for Strategic studies (IISS)* and *Bonn International Centre for Conversion(BICC)*. Indeks ini menunjukkan tingkat militerisasi 153 negara yang dikeluarkan secara tahunan sejak tahun 1990 oleh BICC dengan dukungan Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Indikator-indikator yang terlibat dalam GMI dengan bobot penentunya yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator-Indikator Penyusun *Global Military Indeks*

Kategori	Indikator	Bobot
Pengeluaran Militer dan persenjataan	Anggaran militer sebagai persentase dari GDP	5
	Anggaran militer dalam hubungannya dengan pengeluaran kesehatan	3
Personel tentara	Jumlah personil militer dalam hubungannya dengan populasi.	4
	Jumlah cadangan militer dalam hubungannya dengan populasi.	2
	Jumlah personil militer dalam hubungannya dengan tenaga medis.	2
Persenjataan	Persenjataan berat dala hubungannya dengan populasi	4

Catatan : Indeks GMI telah dinormalisasi antar data dan antar waktu dengan skala antara 0-1000. Sumber : Grebe, Jan. (2011) *“The Global Military Index”*, Occasional Paper of Bonn International Center for Conversion, February 2011 [6].

Pengeluaran militer dalam kaitannya dengan GDP adalah indikator yang paling penting untuk menentukan tingkat militerisasi. Sumber daya keuangan yang disediakan melalui anggaran militer oleh pemerintah merupakan faktor penting yang mempengaruhi kapasitas dan ukuran angkatan bersenjata sebuah negara.

---

Indikator lain GMI menggunakan adalah perbandingan antara total anggaran militer dan pengeluaran pemerintah pada layanan kesehatan.

Selain pengeluaran militer, tingkat militerisasi juga diwakili oleh hubungan militer dengan jumlah penduduk dan tenaga medis. Yang paling penting sebagai indikator dalam kategori ini adalah jumlah personil militer dengan jumlah penduduk. Indikator kedua dalam kategori ini adalah persentase pasukan cadangan terhadap total populasi. Bisa saja suatu negara memiliki jumlah tentara yang sedikit, tetapi jumlah esensial dari cadangan personil militer yang tersedia dalam masyarakat secara substansi banyak dan siap, seperti Swiss. Indikator lainnya adalah dengan membandingkan jumlah total pasukan militer dengan jumlah dokter di dalam suatu negara untuk melihat cerminan hubungan keahlian militer dan keahlian non-militer di masyarakat.

Penentuan tingkat militerisasi negara, selain melihat sumber daya dan personil militer suatu negara, kepemilikan senjata berat bagi angkatan bersenjata juga harus diperhitungkan, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Senjata berat didefinisikan diantaranya kategori : kendaraan lapis baja (untuk mengangkut personel, sebagai tank ringan, tank tempur utama), artileri kaliber besar (seperti peluncur roket ganda, artileri *self-propelled*, dan lain-lain), pesawat tempur (helikopter serang, pesawat tempur), dan kapal tempur utama (seperti sub marinir, kombatan permukaan utama yang berukuran besar)

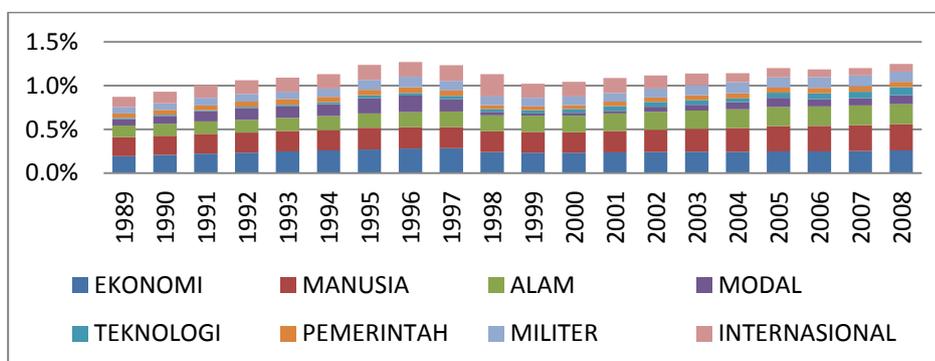
Jumlah populasi diambil secara statistik dari Laporan PBB (*World Development Indicator*, WDI). Jumlah pengeluaran militer setiap negara disusun berdasarkan data-data dari SIPRI. Semua data personil militer berasal dari data yang diterbitkan oleh IISS. Data untuk produk domestik bruto diambil dari data IMF, sedangkan data pengeluaran kesehatan dan jumlah tenaga dokter diambil dari data WHO.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Keseimbangan Kekuatan Negara-Negara di Perbatasan

Menganalisa kekuatan kawasan di lingkungan strategis, perlu dilihat keseimbangan kekuatan fisik suatu negara yang dilihat dari kekuatan nasionalnya. Kekuatan nasional atau *national power* dalam pemikiran spesifik merupakan kemampuan strategis dari suatu negara berdaulat menggunakan sumber-sumber daya secara keseluruhan untuk mempengaruhi negara lainnya. Hal ini merupakan indikator penting dalam mengukur kondisi nasional dasar dan sumber-sumber daya dari suatu negara, serta indikator komprehensif untuk ekonomi, politik, militer dan kekuatan-kekuatan teknis suatu negara.

Hutasoit [7], telah menghitung *national power* dari Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Ditemukan bahwa Indonesia memiliki kekuatan nasional yang cukup tinggi karena kepemilikan sumber dayanya yang besar. Gambar di bawah memperlihatkan perkembangan kekuatan nasional Indonesia melalui indeks *national power*, seperti terlihat pada Gambar 1.

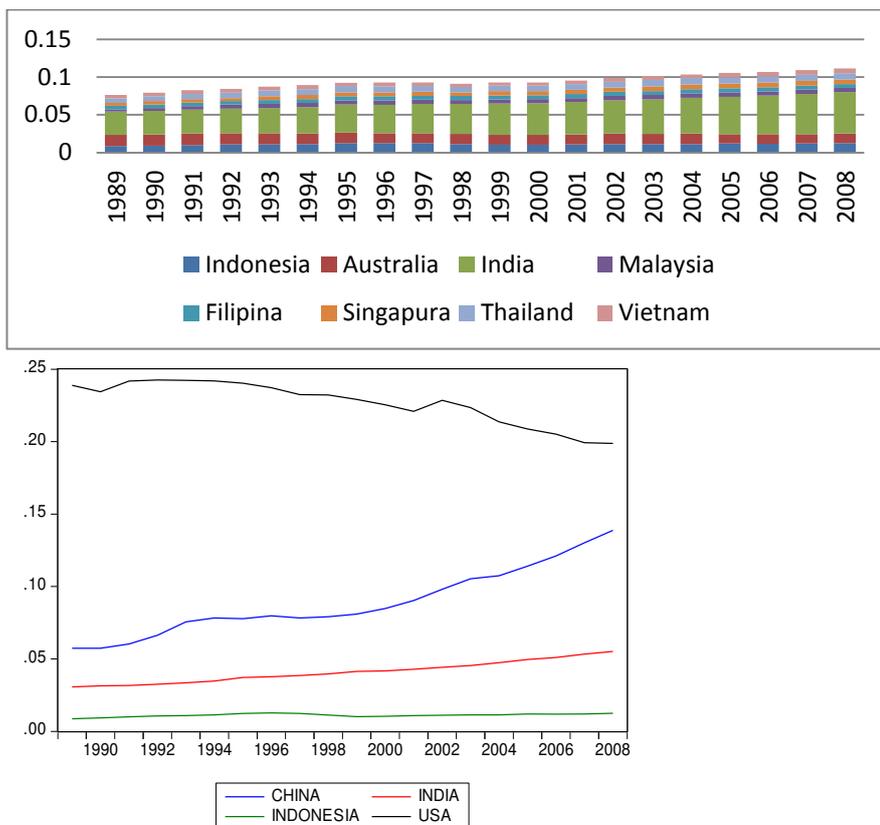


Gambar 2. Kekuatan Sumber-Sumber Daya Indonesia (% dunia)

Sumber : Hasil olah data dari *World Development Indicator*

Indonesia memiliki rata-rata 1,2 % dari kekuatan dunia. Ini menunjukkan kekuatan nasional yang cukup besar. Sangatlah wajar jika Indonesia berambisi untuk menjadi salah satu pusat perekonomian dunia. Akan tetapi kekuatan nasional ini belumlah diimbangi dengan sumber daya teknologi yang tinggi.

Berikut ini diperlihatkan kekuatan nasional negara-negara lain kawasan regional Indonesia sebagai pembandingan, yaitu :



Gambar 3. *National Power* Antar Negara

Sumber : Hasil olah data dari *World Development Indicator*

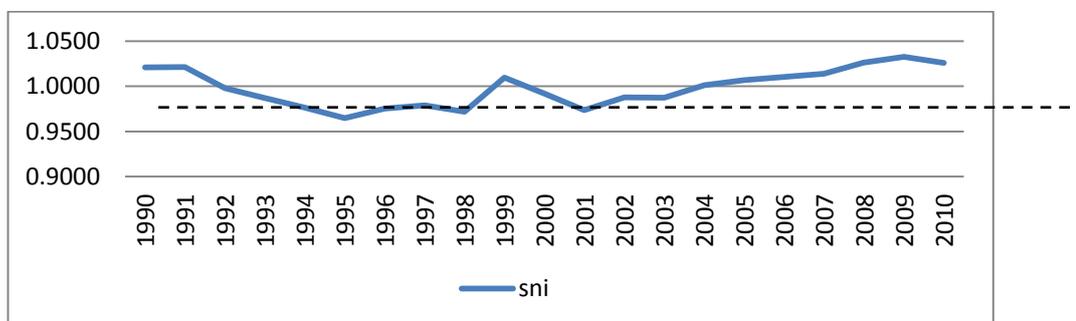
Data menunjukkan, Indonesia termasuk memiliki sumber daya yang besar diantara seluruh negara di lingkungan strategisnya setelah India dan Australia. Lalu berikutnya Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Timor Leste dan Kepulauan Palau. Singapura walaupun merupakan negara yang relatif kecil tetapi memiliki porsi kekuatan yang cukup besar pula yaitu sekitar 0,6% dari kekuatan nasional total seluruh dunia. Singapura sangat dominan dengan sumber daya internasional dan sumber daya modalnya. Indonesia sangat dominan pada sumber daya ekonomi dengan GDP yang cukup besar dan jumlah penduduk yang sangat besar, serta sumber daya alam.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa India sangat dominan meningkatkan kekuatan nasionalnya dari tahun ke tahun. Lihat juga Cina yang memang menjadi kekuatan ekonomi baru dunia, mengalami perubahan sangat besar, sedangkan Amerika Serikat yang menghadapi krisis menghadapi penurunan kekuatan. Dari data-data di atas tidak dipungkiri Indonesia memiliki kekuatan nasional yang cukup

tinggi, sedangkan India dan China tumbuh menjadi salah satu kekuatan dominan di dunia selain Amerika Serikat.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa distribusi kekuatan dunia tidak berimbang. Setiap negara berlomba-lomba meningkatkan kekuatannya khususnya pada sumber daya ekonomi. Salah satu yang dilakukan oleh setiap negara adalah meningkatkan investasi karena ekonomi merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional. Indonesia menyadari, merupakan termasuk negara yang memiliki kekuatan nasional besar melalui sumber daya alam, ekonomi dan populasinya, sehingga selain memberikan keuntungan yang potensial tetapi juga mengandung ancaman. Banyaknya populasi akan menyebabkan biaya yang besar dalam melakukan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Kekayaan alam yang besar akan memancing pihak-pihak lain untuk mengambil paksa sehingga meningkatkan gangguan keamanan nasional.

Hutasoit [8], menghitung ancaman tradisional/eksternal yang dihadapi Indonesia dari lingkungan strategisnya, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.

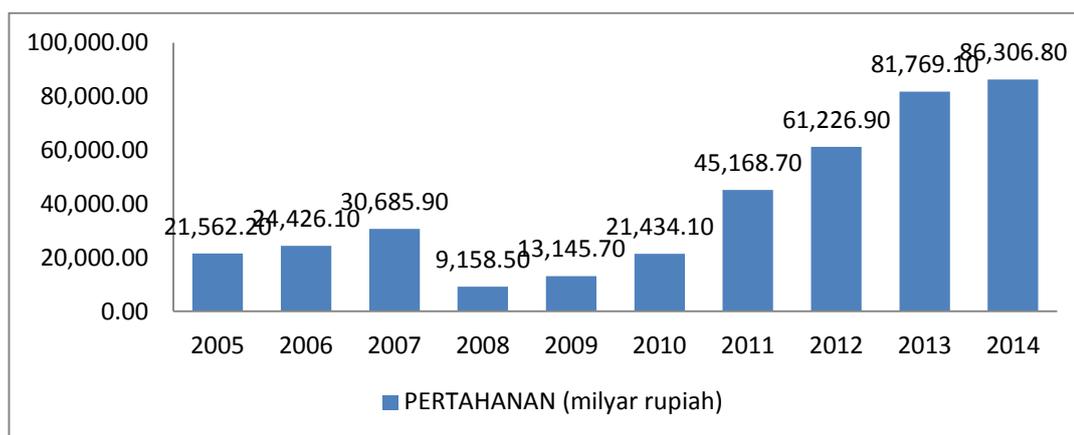


Gambar 4. Ancaman yang Dihadapi Indonesia. Sumber : Hasil pengolahan data.

Berdasarkan Gambar 4., Indonesia pada era orde baru secara relatif adalah aman dari ancaman eksternal, namun sejak tahun 1995 tingkat ancaman Indonesia secara tren meningkat. Bahkan pada tahun 1998-1999 pada saat puncak krisis moneter kekuatan rata-rata lingkungan strategis sedikit lebih besar dari kekuatan militer Indonesia. Hal ini dikarenakan pada saat itu program-program pemerintah difokuskan untuk mengatasi krisis sehingga menyebabkan program pertahanan nasional menurun. Di era reformasi dapat dilihat bahwa setelah tahun 2004 ancaman potensial dari lingkungan strategis meningkat sedikit lebih besar daripada

kekuatan militer Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa sejak tahun 2004 secara relatif negara-negara di lingkungan strategis Indonesia telah meningkatkan tingkat militerisasinya.

Untuk menghadapi ancaman ini, sejak tahun 2012 Indonesia telah mulai meningkatkan anggaran militernya secara signifikan, setelah sangat rendah pada tahun 2008, terlihat pada grafik berikut ini :

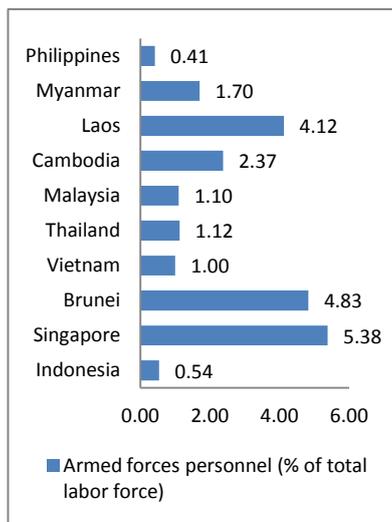
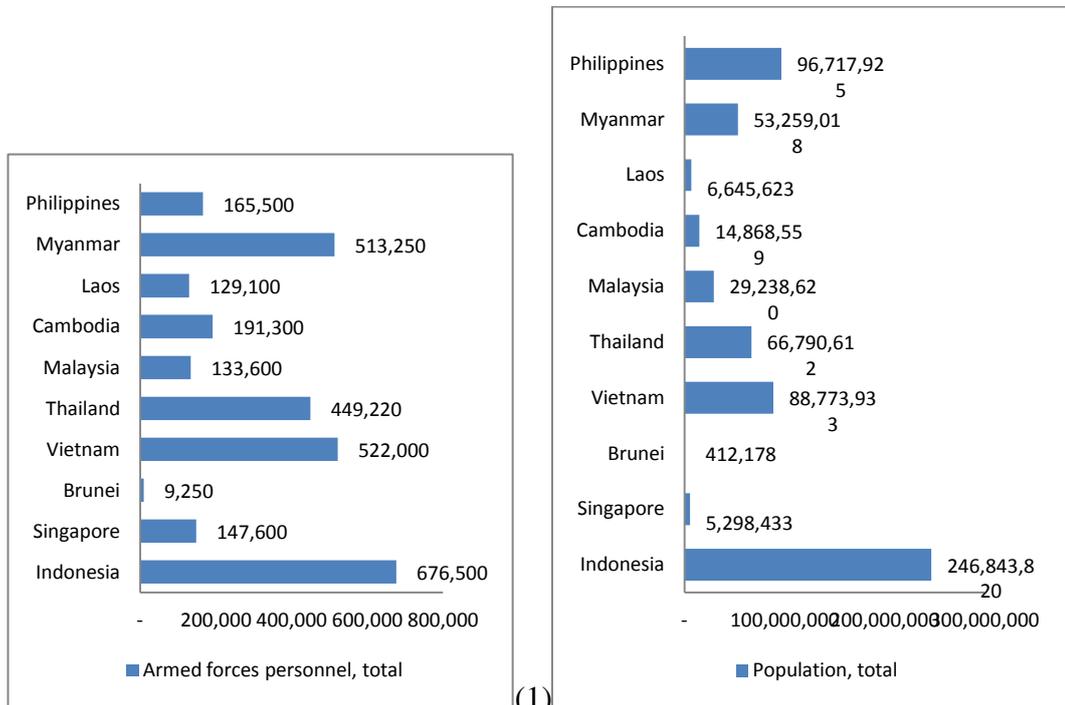


Gambar 5. Anggaran Pertahanan Indonesia. Sumber : APBN Indonesia.

### 3.2 Tingkat Militerisasi Negara-Negara ASEAN

Untuk membedah ancaman yang dihadapi Indonesia, peneliti melihat tingkat militerisasi negara-negara di lingkungan strategisnya, khususnya ASEAN. Tingkat militerisasi tidak hanya dilihat dari tingkat persenjataan dan teknologi perang, jumlah tentara dan besaran anggaran militernya, tetapi juga ikut diperhitungkan besaran indikator-indikator perekonomian suatu negara yang harus dijaga stabilitas dan pertumbuhannya melalui pertahanan nasionalnya sebagai kapabilitas militer suatu negara.

Pada tabel di bawah ini digambarkan kapabilitas militer negara-negara ASEAN melalui *manpower*-nya atau jumlah tentara yang dimiliki, seperti pada Gambar 1.



(2)

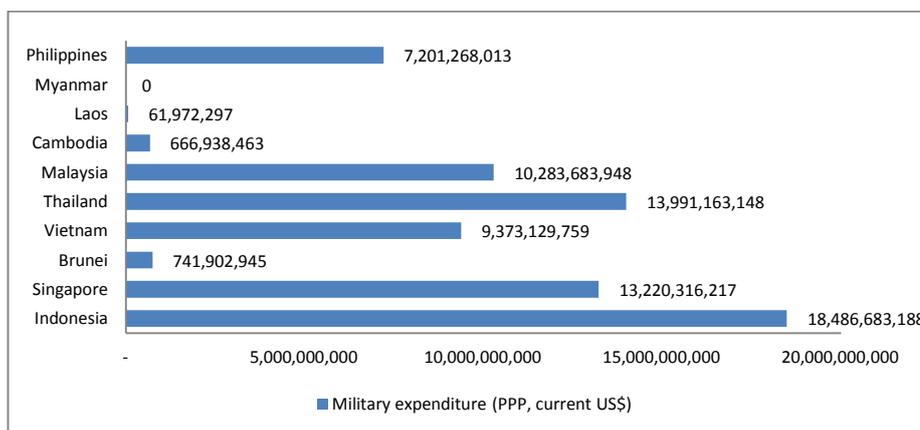
(3)

Gambar 6. (1) Jumlah Tentara Total (rata-rata tahun 2012-2013), (2) Total Populasi (rata-rata tahun 2012-2013) (3) Rasio Tentara terhadap Angkatan Kerja (rata-rata tahun 2008-2012, %). Sumber : hasil olah data dari *World Development Indicator*

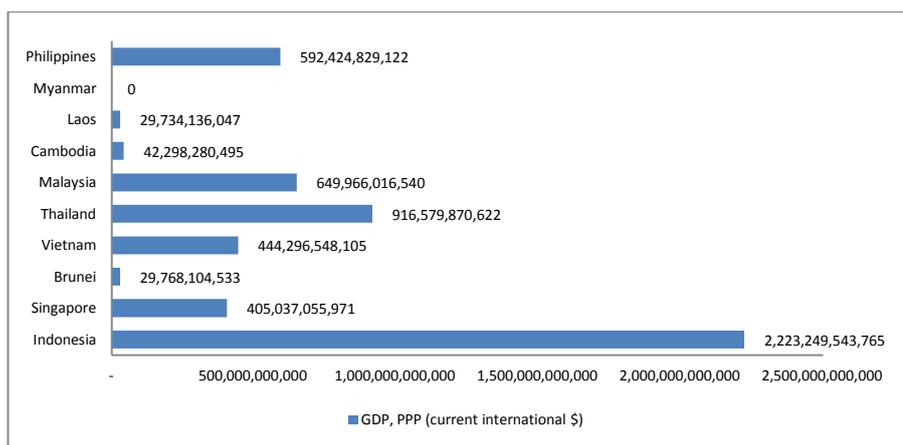
Terlihat dari gambar di atas, jumlah tentara Indonesia adalah yang tertinggi tetapi dibandingkan dengan populasinya melalui rasio tentara terhadap angkatan kerjanya memiliki nilai termasuk rendah bersama Filipina. Sedangkan Laos, Brunei

dan Singapura memberikan gambaran sebaliknya, negara-negara ini memiliki rasio yang tinggi.

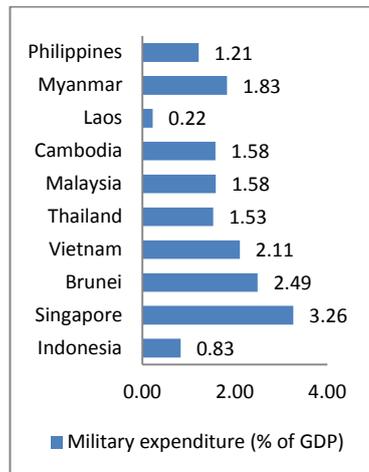
Selain jumlah tentara, alokasi anggaran pertahanan merupakan elemen yang paling penting sebagai salah satu unsur yang menentukan kapabilitas militer suatu negara. Negara dengan belanja militer lebih besar atau di atas rata-rata normal memiliki indikasi kekuatan militer yang besar. Negara yang memiliki indikasi kekuatan persenjataan yang besar tentunya akan terlihat lebih mengancam dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki alokasi pertahanan yang relatif lebih kecil. Secara grafis trend anggaran pertahanan Indonesia dan negara-negara ASEAN dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



(1)



(2)



(3)

Gambar 7. (1) Anggaran Militer (PPP, current US\$), (2) GDP (PPP, current US\$), (3) Rasio Anggaran Militer terhadap GDP (%). Semuanya merupakan data rata-rata 3 tahun (2011-2013).

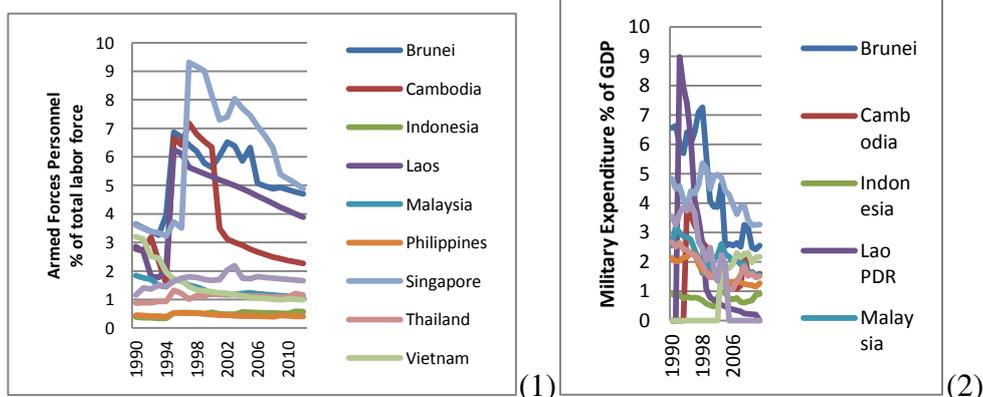
Sumber : hasil olah data dari *World Development Indicator*

Terlihat secara absolut anggaran pertahanan di ASEAN meningkat. Peningkatan anggaran pertahanan ini tidak serta merta menimbulkan kecurigaan terhadap agresifitas suatu negara. Dapat saja hal ini terjadi karena mereka memang ingin meningkatkan pertahanannya sendiri dalam menghadapi ancaman seiring dengan kemajuan ekonomi yang dialami. Namun, dari proporsinya dengan GDP, jumlah anggaran pertahanan di kawasan ASEAN cenderung menurun. Untuk Indonesia, hasil ini hampir sama dengan rasio tentara, jumlah anggaran pertahanan Indonesia adalah yang tertinggi tetapi dibandingkan dengan GDP-nya memiliki nilai termasuk rendah bersama Laos. Sedangkan Singapura rasio anggaran militer terhadap GDP yang tertinggi di kawasan ASEAN.

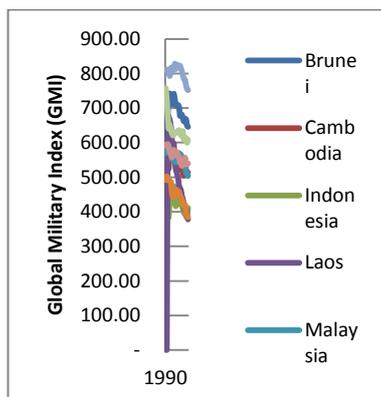
Dominannya Singapura, dimana anggaran militernya memberikan proporsi sangat besar dibandingkan negara-negara lainnya, mungkin saja dapat dimengerti karena tingkat perekonomiannya sangat baik dengan tingkat kesejahteraan manusia yang

cukup tinggi<sup>2</sup>. Singapura menganggarkan pengeluaran militer rata-rata 3,26 % dari pendapatan domestik brutonya, sekitar dua kali lipat dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Namun proporsi ini terlihat terlalu besar karena negara tersebut memiliki luas wilayah dan jumlah populasi yang sangat kecil. Sebaliknya, kecilnya negara Singapura mungkin saja menjadi kelemahannya, sehingga negara tersebut mengeluarkan segenap kemampuannya untuk membangun pertahanan dalam menghadapi negara-negara lain yang lebih besar di kawasan ASEAN.

Penelitian ini, tingkat militerisasi diproksi dari kapabilitas militer yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain. Penentuan kapabilitas militer untuk menentukan tingkat militerisasi merupakan variabel persepsi yang sangat abstrak. Para peneliti dari *International Institute for Strategic Studies* (IISS) menyusun *Global Military Indeks* (GMI) untuk menggambarkan kapasitas kekuatan persenjataan atau tingkat militerisasi terhadap kecenderungan peningkatan atau penurunan persenjataan dalam suatu negara. Pada tabel dan grafik di bawah ini ditampilkan GMI dari negara-negara ASEAN :



<sup>2</sup> Terlihat dari *Human Development Index* negara Singapura yang masuk dalam kategori *very high human development* dalam sepuluh tahun terakhir ini. Pada tahun 2010 Singapura berada pada ranking 27.

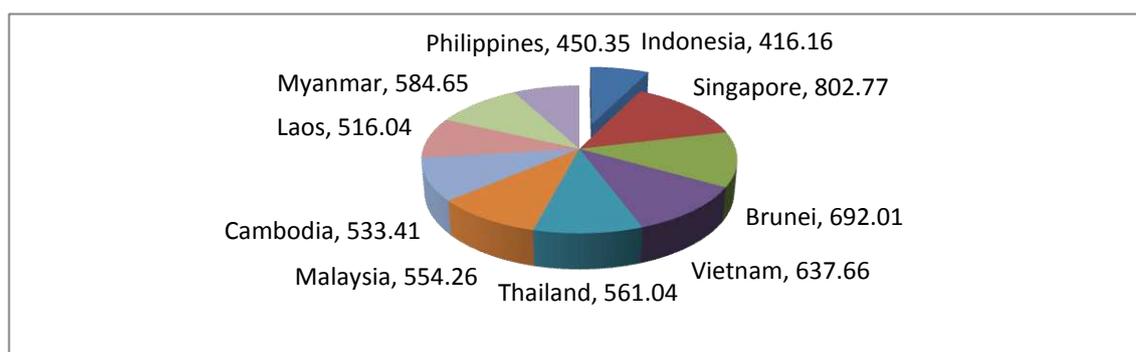


(3)

Gambar 8. (1) Rasio Tentara terhadap Angkatan Kerja (%), (2) Anggaran Militer terhadap GDP (%), (3) Global Military Index (GMI). Semua data dari tahun 1990-2012

Sumber : hasil olah data dari *World Development Indicator*

Walaupun tingkat militerisasi secara keseluruhan mulai menurun di kawasan ASEAN, namun secara absolut, keseluruhan keseimbangan militer pada negara-negara Asia masih mengalami tren meningkat untuk beragam tujuan, misalnya menghadapi ancaman keamanan internal dan eksternal, perlombaan senjata, pemberontakan, konflik dalam negara dan antar negara, dan program-program modernisasi. Secara rata-rata tingkat militerisasi negara-negara Asean dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 9. *Global Military Index (GMI) Rata-Rata Tahun 2009-2012*

Catatan :Indeks GMI telah dinormalisasi antar data dan antar waktu dengan skala antara 0-1000. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi tingkat militerisasi suatu negara.

Sumber : *The Global Military Index, Bonn International Center for Conversion(BICC)*

Berikut ini dipaparkan analisa tingkat militerisasi negara-negara ASEAN.<sup>3</sup> Untuk negara Singapura, pengeluaran pertahanan meningkat cepat dengan besaran militer 3%-5% dari GDP dengan nilai rasio yang cenderung menurun. Sebagai respon dari resesi ekonomi, pemerintah tidak menambah kekuatan militernya tetapi tetap memperhatikan program pengembangan senjata modernnya. Konsep pertahanan Singapura adalah *total defence*, dimana kemampuan negara dalam menanggulangi ancaman adalah dengan mempersiapkan kekuatan peralatan kecil sampai terbaiknya dengan persiapan cadangan yang lebih besar, cadangan tentara yang terlatih baik, dan sektor sipil yang dapat dimobilisasi untuk mendukung kekuatan bersenjata. Tingginya tingkat militerisasi Singapura yang hampir mendekati Israel ini tidaklah dapat dijelaskan maksud dan tujuannya. Karena, diukur terhadap ukuran kecil dari negara kota dan penduduk yang relatif kecil dan pembangunan yang damai secara keseluruhan, dengan memiliki sistem persenjataan yang modern dan tentara terlatih, dapat dikatakan tingkat militerisasinya terlalu besar dan bisa saja mengganggu pemikiran negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan perlombaan saja (*security dilemma*).

Malaysia sejak tahun 1990 sampai dengan 2010 telah meningkatkan anggaran militernya tiga kali lipat, tetapi rasio terhadap GDP-nya menunjukkan penurunan yang signifikan, dengan penurunan sekitar 1%. Malaysia memiliki jumlah tentara hampir sama dengan Singapura tetapi memiliki rasio dengan angkatan kerjanya yang jauh lebih rendah. Tingkat militerisasi negara ini juga termasuk tinggi, dengan indeks di atas 500 namun memiliki kecenderungan penurunan.

Untuk Indonesia, pengeluaran pertahanan menurun selama akhir abad dua puluh. Secara garis besar adalah karena rendahnya prioritas bagi pengeluaran pertahanan. Tentara Indonesia telah mendorong pemimpin berpikir bahwa sumber-

---

<sup>3</sup>Dianalisa juga oleh Myo, Khin Ma Ma [9]. Military Expenditure and Economic Growth in Asia, University of Aberdeen, dan dari Annual Report of Bonn International Center for Conversion

sumber daya domestik yang langka dan bantuan asing tidak dapat dialihkan untuk penggunaan militer tanpa memperlambat pertumbuhan dan pembangunan nasional. Namun sejak 2012 Indonesia mulai memimpin kenaikan anggaran militer di kawasan ASEAN. Kenaikan ini tidak menyebabkan meningkatnya tingkat militerisasi negara bahkan Indonesia memiliki tingkat militerisasi yang terendah di kawasan ASEAN.

Ketika periode pertahanan mulai diperhatikan, pengeluaran militer di Filipina mengalami peningkatan dalam tingkat rata-rata 1%-2% dari GDP. Untuk keamanan nasional, ancaman internalnya adalah aktifnya rejim komunis yang berakar pada sejarah pemberontakan. Walaupun tidak terdapat agresi eksternal, namun ada masalah perbatasan yang berimplikasi pada keamanan dengan negara tetangganya. Khususnya, Filipina mulai meningkatkan anggaran militer karena ikut terlibat dalam sengketa teritorial di Laut Cina Selatan dengan China.

Brunei selama bertahun-tahun telah menunjukkan tingkat militerisasi yang tinggi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir, tingkat ini telah menurun. Karena cadangan minyak dan gas yang kaya, Brunei memiliki salah satu PDB tertinggi negara-negara berkembang. Meskipun pada saat ini tidak ada ancaman langsung bagi negara, belanja pemerintah untuk militer sangat tinggi dilihat dari kecilnya ukuran negara kerajaan ini, dengan indeks tingkat militerisasi di atas 600.

Pengeluaran pertahanan Thailand meningkat, namun *trend*-nya menurun dalam besaran relatif militer terhadap GDP. Ini mungkin dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat. Pada awal 1990-an, Thailand menyempurnakan program modernisasi pertahanannya. Pendekatan Thailand dalam pengembangan pertahanannya adalah bukan untuk melakukan agresi. Untuk perhatian keamanan internalnya, Thailand banyak menghadapi ancaman yang bervariasi di perbatasan oleh pemberontak separatis.

Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja juga memiliki tingkat militerisasi yang cukup tinggi dengan indeks di atas 500, mengingat situasi politik secara umum mungkin menjadi faktor yang mendasari, dan adanya konflik internal. Bahkan Vietnam memiliki tingkat militerisasi yang sangat tinggi dengan nilai

---

indeks di atas 600, terlebih adanya keterlibatan mereka dalam ketegangan dengan China karena sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.

Tingkat militerisasi negara-negara ASEAN termasuk tinggi karena rata-rata memiliki indeks GMI di atas 500, hanya Indonesia yang memiliki indeks di bawah 500 (paling rendah di kawasan ASEAN) dan Filipina setelah Indonesia. Sesuai dengan konsep *natural balance of power*, tingkat militerisasi dari suatu negara yang terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan tingkat perekonomiannya, akan menjadikan negara itu menjadi ancaman potensial bagi negara-negara di sekitarnya. Bagi negara-negara ASEAN peningkatan anggaran militer sebaiknya ditujukan untuk menjaga perekonomian nasional mereka, bukan untuk menjadi yang terkuat di kawasan, sehingga militer memang benar-benar ditujukan untuk perdamaian dunia, menghindari konflik, dan diutamakan diplomasi saling mengingatkan antar negara satu dengan lainnya.

Bagi Indonesia, walaupun sudah mulai ada kesadaran di negara-negara ASEAN bahwa anggaran militer ditujukan untuk menjaga perekonomiannya, yang ditunjukkan dengan adanya penurunan tren tingkat militerisasi, tetapi Indonesia tidak boleh menumpukan pertahanan nasional pada tujuan pertahanan negara lain walaupun belum terlihat tanda-tanda agresi. Indonesia harus tetap waspada dan mulai meningkatkan pertahanan dengan kekuatannya sendiri, mengusir segala ancaman dan gangguan yang selama ini belum sepenuhnya diatasi, seperti *illegal logging* dan *illegal fishing*.

#### 4. KESIMPULAN

- Indonesia memiliki rata-rata 1,2 % dari kekuatan dunia. Ini menunjukkan kekuatan nasional yang cukup besar. Dengan menyadari bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki kekuatan nasional yang besar melalui sumber daya alam, ekonomi dan populasinya, selain memberikan potensi keuntungan, tetapi juga mengandung ancaman.
- Sejak tahun 1995 tingkat ancaman Indonesia secara tren meningkat. Bahkan pada tahun 1998-1999 pada saat puncak krisis moneter kekuatan rata-rata

lingkungan strategis sedikit lebih besar dari kekuatan militer Indonesia. Di era reformasi, setelah tahun 2004 ancaman potensial dari lingkungan strategis meningkat sedikit lebih besar daripada kekuatan militer Indonesia. Sejak tahun 2004 secara relatif negara-negara di lingkungan strategis Indonesia telah meningkatkan tingkat militerisasinya.

- Untuk menghadapi ancaman ini, sejak tahun 2012 Indonesia telah mulai meningkatkan anggaran militernya secara signifikan, setelah sangat rendah pada tahun 2008.
- Jumlah *manpower* atau tentara Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, tetapi dibandingkan dengan populasinya melalui rasio tentara terhadap angkatan kerjanya memiliki nilai termasuk rendah, bersama Filipina. Sedangkan Laos, Brunei dan Singapura memberikan gambaran sebaliknya, negara-negara ini memiliki rasio yang tinggi.
- Secara absolut anggaran pertahanan di ASEAN meningkat. Namun, dari proporsinya dengan GDP, jumlah anggaran pertahanan di kawasan ASEAN cenderung menurun. Untuk Indonesia, besaran nominal anggaran pertahanannya tertinggi, tetapi dibandingkan dengan GDP-nya memiliki nilai yang termasuk rendah bersama Laos. Sedangkan Singapura memiliki rasio anggaran militer terhadap GDP yang tertinggi di kawasan ASEAN, bahkan tingkat militerisasinya sangat tinggi.
- Tingkat militerisasi negara-negara ASEAN termasuk tinggi karena memiliki indeks GMI rata-rata di atas 500, hanya Indonesia yang memiliki indeks di bawah 500 (paling rendah di kawasan ASEAN), dan Filipina.
- Tingkat militerisasi secara keseluruhan mulai menurun di kawasan ASEAN, namun secara absolut, keseluruhan keseimbangan militer pada negara-negara Asia masih mengalami tren meningkat untuk beragam tujuan.
- Sebaiknya, bagi negara-negara ASEAN peningkatan anggaran militer atau program pertahanan ditujukan untuk menjaga perekonomian nasional mereka, bukan untuk menjadi yang terkuat di kawasan, sehingga program-program militer memang benar-benar ditujukan untuk perdamaian dunia, menghindari

konflik, dan diutamakan diplomasi saling mengingatkan antar negara satu dengan lainnya.

- Bagi Indonesia, harus tetap waspada dan mulai meningkatkan pertahanan dengan kekuatannya sendiri, mengusir segala ancaman dan gangguan yang selama ini belum sepenuhnya diatasi, seperti *illegal logging* dan *illegal fishing*.

## 5. SARAN

Penelitian ini merupakan penelitian mula-mula dalam pengembangan bidang ekonomi pertahanan. Diawali dengan melihat tingkat militerisasi suatu negara, penelitian dapat dilanjutkan untuk melihat tingkat ancaman di kawasan, dan bagaimana ancaman tersebut direspon melalui penyediaan anggaran pertahanan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Sesuai dengan perkembangan *natural balance of power*, penelitian dapat dilanjutkan untuk menganalisa anggaran pertahanan yang dibentuk, bukan saja bertujuan mengeliminir tingkat ancaman tetapi juga bagaimana program-program pertahanan dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian suatu negara, dan berguna bagi perdamaian di kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Smith P. & Peterman, T. (2000). "Report from the Conference on Evolving Roles of the Military in the Asia Pacific", Honolulu, Hawaii, *The Asia Pacific Center for Security Studies*. March 28-30.
- [2] Chatterjee, Partha. (1972). "The Classical Balance of Power Theory", *Journal of Peace Research*, Vol.9 (1) : 51-61
- [3] Hopkins, Raymond & Mansbach, Richard. (1973). *Structure and Proseses in International Politics*.
- [4] Virmani, Arvind. (2004). "Economic Performance, Power Potential and Global Governance : Towards a New International Order", *ICRIER Working Paper Series*.

- [5] Leboviciq, James H. & Ishaq, Ashfaq. (1987) "Military Burden, Security Needs, and Economic Growth in the Middle East", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.31, No.1, pp.106-138.
- [6] Grebe, Jan. (2011). "The Global Militarization Index (GMI)", *Occasional Paper*, Bonn International Center for Conversion.
- [7] Hutasoit, Posma Sariguna J.K. (2012) "Guns vs Butter : Pertahanan Nasional atau Kesejahteraan sosial", *Makalah Seminar pada Dies Natalis ke-59 Universitas Kristen Indonesia*, Jakarta, 8 Oktober 2012.
- [8] Hutasoit, Posma Sariguna J.K. (2014) "Indonesian Traditional Threat Level of Its Strategic Environment", *Proceeding of 1st PIKSI International Conference on Knowledge and Sciences 2014*, Bandung, 18-19 November 2014.
- [9] Myo, Khin Ma Ma. (2009) "Military Expenditure and Economic Growth in Asia", *University of Aberdeen*, online version.